Panel "Demokrasi dari Bawah"
Perkumpulan Praxis – ISSI
Gedung H FISIP-UI
Ruang H501

POR, SegeraK dan CREDIT UNION ADALAH GERAKAN PERLAWANAN RAKYAT DALAM RANGKA PEMBEBASAN DIRI ATAS DOMINASI EKONOMI, POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA

Latar Belakang

Lahirnya reformasi ternyata telah membawa perubahan besar di berbagai dimensi. Perubahan tersebut terjadi hampir disemua bidang baik bidang demokrasi, politik, ekonomi dan sebagainya termasuk sosial dan budaya masyarakat.

Tekanan demi tekanan yang dialami masyarakat Dayak pada jaman orde baru bukan hanya retorika melainkan kenyataan dimana kebijakan internal kampung dikacaukan dengan membuat kebijakan penggabungan beberapa kampung menjadi satu desa yang sangat tidak lajim terjadi bagi masyarakat Dayak. Kampung dalam kerangka sosiokultural masyarakat Dayak adalah sebuah wilayah otonomi yang berdiri sendiri atas dasar independensi yang tidak terikat oleh kebijakan kampung lainnya. Penggabungan tersebut ternyata telah mengacaukan system otonom di suatu wilayah yang berbeda dari Indonesia ini. System tata wilayah di Kalimantan tentu berbeda dengan di Jawa.

Kebijakan politik yang timpang bagi masyarakat Dayak ini dianggap sebuah pelecehan martabat karena sejak jaman orde baru tidak satu pun orang Dayak di Kalbar yang menjabat sebagai pejabat public. Gubernur Dayak baru terjadi dua kali di Kalbar yaki pada jaman orde lama dan pada jaman orde reformasi. Pada jaman orde baru tidak satu pun pejabat dari kalangan masyarakat Dayak. Hal itu jelas sebuah tindakkan diskriminasi politik oleh pemerintah jaman itu.

Tidak ada gerakan politik, tidak ada yang boleh berkembang atas nama rakyat di jaman orde baru sebab berkumpul dan bersyarikat sangat dilarang pada waktu itu. Berbicara untuk mengembangkan masyarakat disalah tafsirkan oleh pemerintah sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap pemerintah dan sebagainya. Anggapan tersebut sangat memukul masyarakat Dayak dan jelas sangat tidak membangun masyarakat di daerah khususnya masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak selalu menjadi objek kebijakan pemerintah. Hal itu kini tidak akan terjadi lagi karena Negara telah menjamin kebebasan berkreasi dan berekspresi serta berkumpul dan berserikat. Otonomi daerah salah satu wujud kebebasan yang terjadi. Kebebasan tersebut akhirnya disambut positif oleh masyarakat Indonesia.

Perubahan lain yang kentara adalah pada bidang politik dimana system demokrasi Indonesia berubah dengan cepat sehingga perubahan tersebut segera di follow up dengan baik diberbagai daerah dengan terbentuknya pemerintah kabupaten dengan status otonomi dimana segala hal menyangkut bagaimana kabupaten itu membangun dirinya secara mandiri.

Selain dari pada itu perubahan tersebut juga ternyata diikuti dan disambut oleh beberapa aktivis dalam jajaran Pancur Kasih Group Kalimantan Barat untuk mencoba bertarung dalam politik. Beberapa orang yang ikut serta dalam perhelatan politik tersebut diantaranya DR. Piet Herman Abik, Maria Goreti, S.Sos, M.Si dimana keduanya berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Sementara beberapa yang lainnya seperti AR. Mecer dan Drs. Stepanus Masiun bertarung dalam pilkada Kalimantan Barat.

AR. Mecer mencoba untuk bertarung dalam perhelatan calon gubernur/wakil gubernur Kalimantan Barat dimana ia mengambil posisi sebagai wakil. Calon lain adalah Drs. Stepanus Masiun yang juga bertarung sebagai calon Bupati Sekadau dimana keduanya gagal dalam merebut posisi kepala daerah sementara dua anggota DPD lolos dengan baik menuju kursi DPD-RI.

Kenyataan tersebut lah yang membawa sebagian aktivis Pancur Kasih mulai melirik peluang tersebut dimana berdasarkan visi dan misi gerakan, politik juga adalah bagian esensi yang harus direbut demi harkat dan martabat masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Perhelatan politik tersebut dianggap sebagai jembatan guna untuk dapat merubah kebijakan yang tidak pro rakyat menjadi pro rakyat dengan cara memasukkan idealisme dan pemikiran-pemikiran yang berbasis NGO pro rakyat kedalam system pemerintahan di daerah. Hal itu terus dijalankan dalam setiap kesempatan dimana ada celah untuk dapat masuk.

Diakui memang bahwa sejauh ini gerakan tersebut masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam bidang politik sehingga wajarlah kegagalan selalu terjadi apalagi gerakan Pancur Kasih terutama melalui Credit Unionnya bukanlah sebuah lembaga politik sehingga kendaraan seperti CU bukanlah kendaraan yang tepat dalam melayani aspirasi politik rakyat.

Kini sudah ada ratusan ribu jumlah anggota CU tersebar di seluruh Kalimantan yang punya keinginan untuk bebas secara financial dalam kurun waktu 30-50 tahun kedepan. Mereka tercatat sebagai anggota CU di berbagai CU di Kalimantan. Sebagian besar CU berkembang dengan baik di Kalbar sebagai suatu usaha pembebasan diri dibidang ekonomi.

Keberhasilan dua orang anggota DPD-RI asal Kalbar dianggap sebagai perjuangan gerakan Pancur Kasih sehingga pasca keberhasilan dua orang di DPD-RI iikuti oleh berbagai aktivis lainnya namun tidak sedikit diantaranya gagal dalam menggapai impian tersebut.

Maksud dari ikutnya para aktivis di kancah politik adalah bagaimana berbagai kebijakan public yang selama ini dihasilkan oleh pemerintah yang kurang di follow up oleh pemerintah untuk dapat di tindak lanjuti lebih serius oleh para aktivis yang terlibat dibidang politik sehingga berbagai kebijakan public benar-benar untuk kepentingan public. Sejauh ini langkah tersebut masih belum banyak berhasil.

Keterlibatan CU Dalam Dunia Politik Indonesia

Jika melihat kenyataannya bahwa CU adalah sebuah lembaga keuangan berbasis kerakyatan yang dilahirkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu kini lebih banyak bekerja dan melayani kepentingan masyarakat secara sungguh-sungguh. Melihat fenomena itu tidak seharusnya CU digunakan sebagai kendaraan politik untuk mencapai kejayaan.

Terlibatnya CU secara politik oleh banyak aktivis membuah gerah anggota CU diseluruh Kalimantan Barat sehingga ada banyak pendapat yang tidak setuju jika CU digunakan sebagai kendaraan politik sebab CU bersifat universal.

Menyadari hal itu memang keliru, beberapa petinggi gerakan ini segera mengambil kebijakan untuk menggunakan SegeraK menjadi organisasi yang mewadahi aspirasi politik rakyat yang tidak secara praktis lagi menggunakan CU. Tantangan penolakkan jika CU digunakan sebagai kendaraan politik disebabkan oleh karena CU milik bersama dan bebas dari ikatan politik apapun. CU merupakan lembaga keuangan murni dan jangan diganggu dan dicampuri dengan kegiatan lain yang bukan menyangkut transaksi keuangan karena dapat mengacaukan situasi.

Sebelum SegeraK memang sudah ada POR (Pemberdayaan Otonomi Rakyat) yang berjalan sebagai mesin politik dalam mensukseskan dua bakal calon kepala daerah di Sekadau dan pemilu gubernur Kalbar yang lalu. Menjalankan roda orgaisasi setengah-setengah masih menjadi tantangan sebab banyak diantara aktivis POR sendiri sudah terlibat di beberapa kegiatan lain seperti pendirian stasiun TV yang dimaksudkan sebagai sarana mesin politik menuju KB 1 yang lalu dan itu gagal. Dua kandidat tersebut gagal total padahal sudah mengorbankan banyak tenaga, pemikiran dan juga biaya.

Bertolak dari pemikiran tersebutlah maka SegeraK difungsikan sebagai lembaga aspirasi politik aktivis. Hal yang masih disayangkan dalam gerakan ini adalah sumberdaya manusia yang mengatur jalannya organisasi aspirasi ini tidak mempunyai sense terhadap politik sehingga hal ini dijalankan dengan struktur baku dan kaku sehingga secara langsung maupun tidak CU terlibat tidak lagi secara organisasi namupun secara personal.

Dalam usia yang masih muda dalam politik, Pancur Kasih mencoba masuk dengan beberapa aktivisnya dalam kancah poltik tersebut untuk mengambil alih kebijkan-kebijakan public namun sejauh ini belum berhasil dengan baik walaupun beberapa diantara aktivis Pancur kasih sudah ada yang menjabat jabatan public selain dari dua anggota DPD-RI yakni Herman Ivo, Budi, Jansen dan Paulos Hadi yang telah masuk sebagai anggota DPRD Propinsi maupun Kabupaten. Karena kecilnya persentase tersebut maka mereka belum mampu merubah kebijakan public dengan baik sesuai keinginan masyarakat.

Jauh sebelum itu Pancur Kasih sudah mencoba melibatkan diri dalam politik dengan menyambut sebuah partai bernama PDKB (Partai demokrasi Kasih Bangsa) yang dimotori oleh Kristiadi. Dalam perjalanannya pada pemilu 2004 partai tersebut ternyata tidak lolos verifikasi sehingga tidak dapat mengikuti pemilu 2004.

Kegagalan tersebut tidak menyurutkan niat para petinggi dan aktivis Pancur Kasih untuk tetap berjuang dalam bidang politik sehingga beberapa petinggi dan ativis tetap maju dengan mencoba jalan lain. Pada pemilu 2004 lalu beberapa aktivisnya berhasil masuk sebagai legislative namun sejauh ini tidak ada ikatan apa-apa antara aktivis dengan kinerjanya sebagai legislative sehingga hubungan antara aktivis yang berhasil dengan gerakan sama sekali terputus. Hal itu te sambung kembali jika ada kebutuhan.

Sejauh ini perubahan dari POR ke SegeraK sebagai kendaraan aspirasi politik cukup baik karena telah membuka kesempatan bagi setiap aktivis yang tertarik dalam bidang politik. Hal-hal seperti dukungan langsung secara moril berlangsung secara mengalir tanpa paksaan. Dukungan materi dari organisasi bagi aktivis sama sekali belum ada kecuali dukungan moril dan kebijakan internal. Hal

berbeda justru terjadi bagi para petinggi dimana dukungan materi oleh para aktivis sangat diwajibkan dalam mencapai cita-cita tersebut.

Yang jelas dalam organisasi tersebut belum ada mekanisme jelas apa dan bagaimana mengelola organisasi tersebut agar berfungsi baik dan berjalan semestinya. Banyak aktivis yang tidak mngerti politik tetapi justru berkecimpung sebagai pengamat politik dan penganalisa politik dalam organisasi tersebut. Belum ada alat ukur yang diberikan untuk mengetahui sense aktivis terhadap suatu kegiatan sehingga sulit mengetahui sesungguhnya jiwa para aktivis tersebut cenderung menggeluti bidang apa.

Pertarungan Politik di Tahun 2009

SegeraK sebagai organisasi aspirasi politik di lingkungan gerakan Pancur Kasih praktis menggantikan posisi CU dan POR yang dulu sempat digunakan sebagai kendaraan aspirasi politik dan mengundang protes anggota CU di seluruh Kalbar. Kini semua dialihkan ke SegeraK sebagai wadah yang dianggap netral karena tidak lagi menggunakan CU sebagai kendaraan sehingga hal ini dapat menjaga imej positif anggota CU yang selama ini merasa terusik.

Menghadapi pemilu 2009 mendatang banyak aktivis dan petinggi yang mencoba terjun di dunia politik. Saat ini sudah ada beberapa calon anggota DPD-RI 2009 dari kalangan Pancur Kasih yang mendaftarkan diri bersedia bertarung dalam kancah politik tersebut. Selain itu beberapa aktivis di beberapa kabupaten pun lolos 10 besar calon anggota KPUD Kalbar diantaranya Evi Flavia di Kabupaten Bengkayang, Djanting di Kapuas Hulu, Silvester Lomon di Kabupaten Landak, Tony Kusmiran dan Sekundus Ritih di Kabupaten Sanggau.

Ke lima calon anggota KPUD tersebut tinggal selangkah lagi menuju kursi KPUD dan kelimanya tidak membutuhkan kebijakan yang bertele-tele. Lima orang tersebut secara terbuka didukung secara moril dan kebijakan oleh organisasi dimana mereka bekerja. Hal ini merupakan suatu langkah maju dalam kebijakan politik gerakan Pancur kasih dimana sebelumnya para aktivis dilarang keras terjun di dunia politik. Hal itu disebabkan kegagalan partai PDKB lalu yang telah mungkin mengecewakan karena gagal dalam verifikasi partai 2004 lalu. Hal itu kini berubah dimana kebijakan internal gerakan ini sudah sangat terbuka dan mempersilahkan kepada setiap aktivis yang ingin terlibat secara langsung di politik. Tindakkan tersebut menjadikan banyak aktivis tertarik untuk terrjun di dunia politik baik melalui independent maupun partai.

John Bamba Direktur Institut Dayakologi menyambut baik aspirasi politik yang berkembang di lingkungan Pancur Kasih sehingga peluang itu perlu direpon dengan positif.

"Kedepan kita akan membuat sebuah lembaga yang khusus menangani partisipasi politik aktivis. Segerak kedepan akan menangani secara strategis persoalan politik. Keinginan tersebut kini sudah tidak dilarang justeru sebaliknya didorong kuat untuk maju dalam politik. Masa lalu pasrtisipasi politik kita tidak disusun dengan baik pada masa lalu tetapi hanya sekadar merespon peluang saja," ujarnya.

Seperti apa yang dikatakan John Bamba bahwa kedepan peluang tersebut akan dikemas lebih baik lagi dan lebih jelas agar tidak menimbulkan bias serta kesalahpahaman terutama dalam gerakan internal itu sendiri.

CU yang beberapa saat lalu pernah digunakan sebagai kendaraan politik kini dikembalikan kepada posisi semua yakni sebagai pelayan masyarakat dalam bidang ekonomi. Tiga pilar yang akan berdiri kokoh kedepan yakni ekonomi, politik dan budaya. Dua organisasi telah melakukan tugasnya dengan baik yakni CU sebagai lembaga ekonomi dan Institut Dayakologi sebagai lembaga budaya. Satu hal yang belum tergarap dengan baik yakni politik.

POR dan CU perah menjadi lembaga yang menyalurkan aspirasi politik aktivis namun tidak maksimal sehingga diambil alih oleh SegeraK. Dan kedepan Segerak sendiri akan dimaksimalkan mnejadi sebuah lembaga spirasi politik yang benar-benar jelas secara mekanisme dalam realitasnya.